DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana

RISKA ALMADINANTI

NIM. B1011191003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Riska Almadinanti
NIM	:	B1011191003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul TA	:	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 September 2026



(Riska Almadinanti)
NIM. B1011191003

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Riska Almadinanti
NIM	: B1011191003
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir	: Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang di kutip maupun rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 16 September 2026



Riska Almadinanti
NIM B1011191003

LEMBAR YURIDIS

Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Riska Almadinanti
B1011191003

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	30 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Prof. Dr. Jamaliah, S.E., M.Si.	15/09/26	
		NIP 196203091987032007		
2.	Pembimbing Pendamping	Romi Suradi, S.E.I., M.E.	14/09/26	
		NIP 198610022019031004		
3.	Ketua Penguji	Yanto, S.E., M.Sc.	8/09/26	
		NIP 197706152003121004		
4.	Anggota Penguji	Hasanah, S.E., M.E.	8/09/26	
		NIP 199412182024062001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 22 SEP 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah **"Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kalimantan Barat"**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, membimbing, mendukung, dan memberikan saran, masukan, serta doa. Dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama Akademik yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan arahan, masukan, dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis hingga terselesainya tugas akhir ini.
6. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Hasanah, S.E., M.E. selaku Dosen Anggota Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis tekhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran tugas akhir ini.

10. Kedua orang tua saya, Bapak Hemanto dan Ibu Sunarti. Terima Kasih sebanyak-banyaknya atas doa, kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini. Serta sangat berjasa didalam kehidupan saya, selalu mengusahakan anaknya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan memberikan motivasi, pengorbanan, dan kesabaran yang telah diberikan berlimpah-limpah dari sejak penulis kecil, saat ini dan seterusnya yang tidak bisa terbalaskan oleh penulis.
11. Teruntuk teman-teman penulis Sausan, Resti, Tiara, Caca, Audrey, Ayu, Hafidzo, Alfina, Annisa, Rizka, Nindi, dan terkhusus Nadya terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dan hiburan yang diberikan kepada saya.
12. Kepada teman-teman kuliah saya Aulia, Suci, Sabila, Riska, Widuri, Gunarsih, dan Nita terima kasih telah berbagi keluh kesah dan berbagi kesenangan selama perkuliahan.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 terkhusus kelas A yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu bertahan dan berjuang selama masa studi hingga terselesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Kritik maupun saran yang bersifat membangun dan bertujuan untuk memperbaiki tugas akhir ini sangat diharapkan, sehingga nantinya menjadi tugas akhir yang baik.

Pontianak, 16 September 2026



Riska Almadinanti
NIM B1011191003

DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Oleh: Riska Almadinanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah adalah wilayah pemerintahan bisa melaksanakan pertanggungjawaban serta pembiayaan keuangannya sendiri, melakukan semuanya secara mandiri di dalam rangka asas desentralisasi. Untuk meninjau sejauh manakah otonomi bisa berjalan dengan substantif, kemandirian keuangan daerah menjadi faktor utamanya. Kemandirian keuangan daerah memberikan cerminan bahwasanya pemerintahan daerah mampu melakukan pembiayaan keperluan pemerintah serta membangun wilayah dengan sendirinya tidak menggantungkan beban yang lebih melalui pertolongan maupun pembiayaan dari pemerintahan pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal sangat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, agar tingkat kemandirian keuangan daerah bisa terus-menerus mengalami peningkatan terdapat tuntutan untuk pemerintahan daerah agar bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah, mendukung pertumbuhannya ekonomi daerah, serta melakukan alokasi belanja modal dengan produktif.

Kemandirian keuangan di Kalimantan Barat masih timpang serta cenderung rendah di sebagian besar kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran PAD dalam pembiayaan pembangunan masih sangat terbatas, dan dana transfer pusat tetap menjadi sumber utama penyokong APBD. Permasalahan ini diikuti oleh PAD dimana pada 10 tahun terakhir masih mengalami fluktuatif dan masih menunjukkan ketergantungan terhadap transfer dari pusat. Selain itu, terdapat juga permasalahan pada belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal di Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami ketidakmerataan. Pada pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan yakni adanya ketimpangan antar daerah, pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan perlu dikaji secara mendalam.

2. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian ini dengan metode penelitian yang fokus terhadap data berbentuk angka. Peneliti mempergunakan data sekunder yang didapatkan dari lembaga resmi diantaranya yakni Badan Pusat Statistik, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berada di 14 kabupaten atau kota wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan rentang waktunya yakni dua bulan dihitung sesudah terlaksananya kegiatan seminar proposal. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel serta pengolahan data menggunakan *eviews 9*. Kegiatan penelitian ini mempergunakan dua jenis variabel yakni variabel independen serta variabel dependen. Variabel independennya tersusun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, serta Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan untuk variabel dependennya ialah Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Hasil Penelitian

Dari hasil uji penentuan model memperoleh model terbaik dalam penelitiaan ini yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa data didalam penelitian ini terdistribusi normal serta terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas Hasil penelitian ini memperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 97,86%. Sementara itu, sisanya sebesar 2,13% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan kemandirian keuangan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut membuktikan

bahwasanya tingkat kemandirian keuangan daerah yang makin tinggi maka pemerintahan daerah juga akan memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang meningkat menggambarkan bahwasanya daerah mampu melakukan pengelolaan serta menggali potensi sumber daya yang dimiliki hingga bisa meminimalisir ketergantungan biaya dari pemerintahan pusat.

2. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan belanja modal yang meningkat memberikan kecenderungan tingkat kemandirian keuangan daerah yang menurun.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut membuktikan bahwasanya tingkat kemandirian keuangan daerah akan makin tinggi apabila pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah juga tinggi.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pemerintahan daerah harus senantiasa memaksimalkan berbagai sumber PAD dengan melakukan peningkatan efektivitas pemungutan pajak, mengelola aset daerah secara lebih produktif, mengembangkan berbagai potensi ekonomi lokal, sektor industri daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Belanja Modal

   Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan belanja modal dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang serta mendorong pendapatan daerah.
3. Bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

   Pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan investasi yang kondusif, memberi dorongan pada berbagai sektor unggulan di daerah misalnya yakni pertanian, perdagangan, perkebunan, sektor jasa serta industri pengolahan, dan melakukan peningkatan terhadap kualitas infrastruktur sebagai upaya yang nantinya bisa yang memberi peningkatan terhadap perluasan lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi masyarakat, beserta mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disaran untuk menambah variabel-variabel lainnya yang diduga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, misalnya yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khuss (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Selain itu, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik berkenaan dengan berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah maka penelitian bisa dilaksanakan dengan periode yang lebih panjang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR.....ii
LEMBAR YURIDIS.....iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....iv
RINGKASAN.....vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK 1

BAB 1 PENDAHULUAN.....2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 7
1.2.1 Pernyataan Masalah 7
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 7
1.2.3 Tujuan Penelitian 7

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 8
2.1 Landasan Teori 8
2.1.1 Desentralisasi Fiskal 8
2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah 8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 9
2.1.4 Belanja Modal 10
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi 10
2.2 Kajian Empiris 11
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 13

BAB 3 METODE PENELITIAN 13
3.1 Metode Analisis 15
3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 15
3.1.2 Model Analisis Regresi 15
3.1.3 Penentuan Model Estimasi 16
3.1.4 Tahapan Analisis Data 16
3.1.5 Uji Asumsi Klasik 17
3.1.6 Uji Hipotesis 17

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 18
4.1 Hasil Penelitian 18
4.1.1 Hasil Uji Seleksi Model 18
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 18
4.1.2.1 Uji Normalitas 18
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas 19
4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas 19
4.1.3 Hasil Model Regresi Data Panel 20
4.1.4 Pengujian Hipotesis 20
4.1.4.1 Koefisien Determinasi (R^2) 20
4.1.4.2 Uji t-Statistik 21
4.1.4.3 Uji F Statistik 22
4.2 Pembahasan 22

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 22
4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 23
4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 25

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI 26
5.1 Simpulan 26
5.2 Rekomendasi 27

DAFTAR RUJUKAN 28
LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Persen) 3
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Miliar) 4
Tabel 1.3 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Miliar) 5
Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Persen) 6
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 9
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 14
Tabel 4.1 Hasil Uji Seleksi Model 18
Tabel 4.2 Uji Normalitas 18
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 19
Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas 19
Tabel 4.5 Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* 20
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 20
Tabel 4.7 Hasil Uji t-Statistik 21
Tabel 4.8 Hasil Uji F Statistik 22

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual 13

DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

[1]Riska Almadinanti

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to examine and analyze the effects of Regional Original Revenue (PAD), capital expenditure, and economic growth on regional financial independence. The study employs a quantitative research approach using panel data covering the period from 2015 to 2025. The data were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Central Statistics Agency. The analysis was conducted using panel data regression techniques. The results indicate that Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on regional financial independence. In contrast, capital expenditure has a negative and significant effect on regional financial independence, while economic growth exerts a positive and significant effect on regional financial independence. Furthermore, the simultaneous test demonstrates that PAD, capital expenditure, and economic growth collectively have a significant effect on the financial independence of local governments in West Kalimantan. These findings suggest that increases in Regional Original Revenue (PAD) and economic growth play an important role in strengthening regional financial independence. Conversely, an increase in capital expenditure is associated with a decline in the level of regional financial independence in West Kalimantan.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth, Regional Financial Independence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan berupa data panel periode 2015-2025 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis yang dilakukan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kalimantan Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah, sementara peningkatan belanja modal diikuti dengan penurunan kemandirian keuangan daerah Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah

rskaalmadinanti@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah adalah satu diantara langkah terpenting dalam reformasi pemerintahan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berupaya memperkuat peran daerah agar pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Dewantoro, 2022). Pemikiran dasar ini sejalan dengan pandangan Tiebout (2017) dan Oates (1999), yang menekankan bahwa keputusan publik akan lebih tepat sasaran jika dibuat sedekat mungkin dengan warga yang merasakan dampaknya. Pemerintah daerah, dengan ruang kewenangan yang lebih luas, diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan program pembangunan yang lebih adaptif.

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah adalah wilayah pemerintahan bisa melaksanakan pertanggungjawaban serta pembiayaan keuangannya sendiri, melakukan semuanya secara mandiri di dalam rangka asas desentralisasi. Untuk meninjau sejauh manakah otonomi bisa berjalan dengan substantif, kemandirian keuangan daerah menjadi faktor utamanya. Kemandirian keuangan daerah memberikan cerminan bahwasanya pemerintahan daerah mampu melakukan pembiayaan keperluan pemerintah serta membangun wilayah dengan sendirinya tidak menggantungkan beban yang lebih melalui pertolongan maupun pembiayaan dari pemerintahan pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, agar tingkat kemandirian keuangan daerah bisa terus-menerus mengalami peningkatan terdapat tuntutan untuk pemerintahan daerah agar bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah, melakukan alokasi belanja modal dengan produktif, serta mendukung pertumbuhannya ekonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat memberikan bukti bahwasanya pemerintahan daerah tersebut bisa melakukan pelayanan, pembangunan serta pembiayaan secara mandiri untuk berbagai proyek pemerintah, kelompok masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerahnya (Halim dan Kusufi, 2012). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PAD yang kuat berkorelasi positif dengan efektivitas tata kelola daerah, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan daerah menjaga stabilitas fiskal jangka panjang (Halim, 2018; Bakar & Said, 2021).

Kondisi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih cukup besar. Meskipun wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang beragam mulai dari perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga jasa kontribusi PAD di sebagian besar kabupaten/kota masih relatif rendah. Perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah juga cukup mencolok. Untuk menggambarkan situasi tersebut, berikut disajikan rasio kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat selama sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Persen)

Kab/Kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah										Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025	
Sambas	8.58	7.46	14.5	8.39	9.31	9.05	11.86	11.63	12.25	19.07	Rendah Sekali
Bengkayang	5.62	4.85	4.62	5.57	5.38	6.81	6.78	7.44	8.01	9.84	Rendah Sekali
Landak	5.89	5.77	12.55	7.97	9.45	9.06	6.3	5.67	7.19	9.03	Rendah Sekali
Mempawah	7.73	7.46	8.55	8.66	10.22	11.79	18.78	17.66	15.87	19.85	Rendah Sekali
Sanggau	9.08	8.82	12.85	10.01	8.42	9.54	11.06	9.58	11.43	16.62	Rendah Sekali
Ketapang	8.74	7.96	9.52	10.51	9.84	13.74	11.39	12.83	11.99	15.18	Rendah Sekali
Sintang	9.07	7.24	6.66	15.03	10.42	10.74	10.59	9.47	9.88	14.91	Rendah Sekali
Kapuas Hulu	6.28	4.42	8.65	4.96	4.82	5.01	5,13	4.82	5.52	7.68	Rendah Sekali
Sekadau	6.24	5.17	9.84	7.86	6.15	6.16	6.32	7.53	7.26	9.55	Rendah Sekali
Melawi	4	3.89	7.11	4.32	3.9	5.84	4.72	3.54	5.46	7.4	Rendah Sekali
Kayong Utara	2.54	1.73	5.33	4.27	4.15	4.57	6.05	6.89	6.44	10.02	Rendah Sekali
Kubu Raya	9.69	8.92	13.3	14.44	14.08	12.55	13.32	12.36	17.6	16.22	Rendah Sekali
Kota Pontianak	45.74	43.47	52.12	45.9	47.75	41.15	54.91	56.38	52.27	66.38	Sedang
Kota Singkawang	17.72	16.1	20.56	19.84	25	21.91	32.84	36.7	40.49	45.74	Rendah

Sumber: djpk.kemenkeu (data diolah), 2026

Tabel 1.1, memberikan bukti bahwasannya kemandirian fiskal di Kalimantan Barat masih timpang serta cenderung rendah di sebagian besar kabupaten. Hanya dua Kota Pontianak dan Singkawang yang menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, banyak sekali kabupaten menunjukkan kemampuan keuangan dengan tingkat kemampuan keuangan yang rendah sekali seperti Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran PAD dalam pembiayaan pembangunan masih sangat terbatas, dan dana transfer pusat tetap menjadi sumber utama penyokong APBD.

Kapasitas fiskal sebuah wilayah di dalam melakukan pembiayaan keperluan pembangunan dianggap lemah ketika memiliki ketinggian ketergantungan pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Hal yang dapat muncul dari keadaan tersebut yakni sejauh manakah PAD bisa dimaksimalkan sebagai sumber biaya utama dalam memperkuat otonomi daerah serta melakukan pengurangan terhadap transfer dana dari pusat agar tidak ketergantungan. Melalui peningkatan PAD bisa memberikan kekuatan dalam mencapai kemandirian keuangan daerah yang merupakan faktor kuncinya. Dengan demikian pemerintahan daerah bukan hanya menggantungkan beban pada alokasi dana dari pemerintahan pusat namun juga bisa melakukan pembiayaan pembangunan dan mengadakan pelayanan untuk masyarakat dengan sendirinya (Ramadhan et al., 2022).

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Miliar)

Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	85,58	102,06	200,32	127,66	148,85	148,14	167,64	192,63	229,12	346,07
Bengkayang	39,46	42,68	45,59	50,30	51,96	62,81	76,61	79,22	84,08	91,72
Landak	46,77	57,18	124,37	78,98	92,87	97,87	73,28	58,91	89,45	93,81
Mempawah	54,18	65,09	71,80	75,77	87,58	96,15	154,47	141,54	147,45	170,99
Sanggau	83,71	93,33	151,92	117,50	117,49	129,73	147,33	146,34	176,13	130,81
Ketapang	121,94	134,96	168,04	190,36	195,24	291,00	225,48	278,35	260,64	266,81
Sintang	103,99	108,41	113,17	240,58	172,28	176,52	162,32	161,01	179,04	231,65
Kapuas Hulu	69,73	67,14	131,22	76,00	79,98	78,66	70,67	69,34	92,32	110,79
Sekadau	33,51	36,60	72,78	59,09	45,36	45,14	49,96	56,83	58,80	73,77
Melawi	29,94	34,13	67,20	40,84	40,58	56,17	43,67	34,87	54,59	97,93
Kayong Utara	13,18	10,81	36,49	27,21	28,60	34,41	39,75	46,67	45,32	60,34
Kubu Raya	86,47	101,31	152,02	184,53	172,84	160,89	165,15	162,21	253,23	248,52
Kota Pontianak	334,71	389,37	476,05	440,36	478,79	413,40	537,80	540,57	593,78	770,83
Kota Singkawang	98,26	103,26	132,10	130,86	166,20	175,46	213,79	232,83	272,08	305,26

Sumber: djpk.kemenkeu, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwasanya pada 10 tahun terakhir PAD kabupaten atau kota di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif. Terdapat variasi yang signifikan antarwilayah, dengan Kota Pontianak mencatatkan PAD tertinggi sebesar Rp770,83 miliar (2025), sementara Kabupaten Kayong Utara mencatatkan PAD terendah sebesar Rp60,34 miliar (2025). Untuk Kabupaten Sambas bukan penyumbang terbesar di Kalimantan Barat, namun masih cukup tinggi perolehan PAD yaitu sebesar Rp346,07 miliar (2025), begitupun dengan Kota Singkawang yang dimana perolehan PAD sebesar Rp305,26 miliar.

Secara keseluruhan, pola PAD di Kalimantan Barat menunjukkan ketergantungan yang besar pada sektor-sektor tradisional dan penerimaan berbasis lahan dan komoditas. Tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat menandakan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, penguatan PAD bukan hanya memiliki fungsi guna melakukan peningkatan kemandirian fiskal, namun juga menjadi upaya yang stategis untuk melakukan pengurangan tergantungnya transfer dana dari pemerintahan pusat dan mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.3 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Miliar)

Kab/Kota	Belanja Modal									
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	298,35	327,92	319,52	286,65	339,87	285,09	222,62	209,72	286,84	320,30
Bengkayang	270,88	339,24	320,48	189,79	180,58	156,74	347,35	294,77	173,94	42,75
Landak	436,36	513,35	309,34	279,42	241,79	197,75	217,87	195,50	175,58	118,16
Mempawah	277,66	388,32	209,55	167,92	176,19	168,06	176,45	186,96	291,58	82,45
Sanggau	122,11	334,21	323,08	265,40	312,98	199,97	180,26	306,54	282,63	117,07
Ketapang	374,80	372,84	456,50	619,14	696,94	594,19	544,85	554,74	670,48	371,08
Sintang	368,74	442,71	435,36	335,98	378,60	273,15	189,35	290,95	277,81	238,22
Kapuas Hulu	369,61	516,74	363,66	363,89	412,30	382,36	236,96	280,79	279,34	169,66
Sekadau	215,78	272,12	241,61	227,42	190,99	165,05	204,69	155,05	140,76	117,61
Melawi	224,79	332,89	373,04	180,71	281,93	180,89	143,18	156,06	116,09	73,81
Kayong Utara	186,41	232,12	258,70	168,43	156,83	167,85	139,80	130,85	92,85	84,59
Kubu Raya	366,20	300,85	256,17	316,08	205,63	216,97	186,66	150,77	186,07	271,58
Kota Pontianak	460,70	403,86	445,33	490,80	437,34	388,56	446,33	442,16	533,19	530,83
Kota Singkawang	214,83	231,49	198,99	242,24	208,34	366,76	139,86	206,75	173,23	210,16

Sumber: djpk.kemenkeu, 2026

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwasanya Kabupaten Ketapang menunjukkan nilai belanja modal tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2024 belanja modal Kabupaten Ketapang mencapai sekitar Rp670,48 miliar, kemudian menurun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp371,08 miliar. Begitupun dengan Kabupaten Bengkayang misalnya, mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp42,75 miliar. Sementara itu, Kota Pontianak memperlihatkan tren belanja modal yang relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 nilai belanja modal menyentuh sekitar Rp533,19 miliar dan tetap berada pada tingkat tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp530,83 miliar. Kestabilan itu menunjukkan bukti bahwasanya pemerintahan kota mampu mempertahankan pembangunan sarana serta prasarana daerahnya dengan berkelanjutan.

Melalui hal tersebut, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya antar kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dalam melakukan pembiayaan belanja modal masih memiliki perbedaan. Dikarenakan belanja modal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kapasitas fiskal, kemampuan wilayah untuk mendorong dengan mandiri, efektivitas pengelolaan anggaran, perbedaan tersebut bisa menjadi salah satu indikator terpenting di dalam melakukan analisa kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah, belanja modal mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melakukan investasi pembangunan. Sejalan dengan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, belanja modal juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2015-2025 (Persen)

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota									
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	4.76	5.24	5.06	4.93	4.75	4.37	4.63	4.68	4.74	4.74
Bengkayang	3.96	5.15	5.62	5.25	5.14	4.33	5.45	4.68	4.75	4.88
Landak	5.11	5.28	5.17	4.92	4.88	4.88	4.64	4.39	4.54	4.67
Mempawah	5.62	5.99	5.87	5.76	5.78	4.1	4.7	5.09	6.62	8.24
Sanggau	3.68	5.34	4.48	4.21	3.73	4.19	4.61	2.04	4.14	5.29
Ketapang	5.53	7.97	7.21	7.83	6.58	5.23	5.42	1.1	4.89	6.76
Sintang	4.57	5.28	5.33	5.15	4.99	3.8	4.97	4.68	4.89	4.97
Kapuas Hulu	4.66	5.28	5.39	4.66	3.8	4.43	4.53	4.61	4.75	4.77
Sekadau	5.75	5.93	5.82	5.83	5.44	4.31	5.1	4.69	4.86	4.87
Melawi	4.7	4.75	4.7	5.25	4.41	4.54	4.9	4.56	4.76	4.23
Kayong Utara	5.03	5.98	5.37	4.94	4.97	4.6	5.03	4.48	4.52	5.89
Kubu Raya	6.35	6.37	6.54	5.25	5.68	5.18	5.43	4.98	4.99	5.05
Kota Pontianak	4.99	5.08	4.96	4.22	4.02	4.61	4.97	4.76	5.03	5.34
Kota Singkawang	6.17	5.17	5.38	4.64	4.41	4.82	4.97	5.06	5.06	5.39

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2026

Berdasarkan gambar 1.4 pada tahun 2025 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat berada pada kisaran 5,38 persen. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Mempawah yang mencapai 8,24 persen, diikuti oleh Ketapang 6,76 persen dan Kayong Utara 5,89 persen. Sementara itu, Kota Pontianak juga menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat dengan laju pertumbuhan mencapai 5,34 persen. Sebagian kabupaten lainnya, seperti Kubu Raya, Sanggau, dan Kota Singkawang mencatat pertumbuhan ekonomi antara 5,05 persen hingga 5,39 persen. Sebaliknya, beberapa daerah yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kabupaten Ketapang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di provinsi ini. Secara keseluruhan, walaupun masih menghadapi tantangan yakni adanya ketimpangan antar daerah, pola pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwasanya pembangunan ekonomi daerahnya berjalan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tersebar merata di seluruh kabupaten/kota.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota tidak hanya mencerminkan variasi struktur ekonomi dan kapasitas sumber daya, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kemampuan fiskal masing-masing wilayah. Dalam memperluas basis PAD wilayah yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi juga memiliki peluang yang jauh lebih besar, mendorong aktivitas investasi, serta meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah umumnya terlihat masih adanya ketergantungan yang tinggi terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat memberikan gambaran bahwasanya pemerintahan daerah mampu melakukan pengelolaan serta memaksimalkan sumber pendapatannya dan bisa membiayai pembangunan tanpa bergantung pada pemerintahan pusat. Tingkat kemandirian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ketersediaan SDA, kualitas tenaga kerja, kapasitas kewirausahaan, investasi modal, struktur industri,

infrastruktur, akses pasar ekspor, kemajuan teknologi, kondisi ekonomi global, serta kapasitas kelembagaan dan efektivitas belanja pemerintah. Optimalisasi seluruh faktor tersebut menjadi kunci dalam memperkuat sturktur ekonomi daerah dan mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan analisa berbagai faktor yang memberikan pengaruh kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat yang berfokus terhadap peranan PAD, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi, dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Pengimplementasian otonomi daerah dapat diperkuat dengan adanya kemandirian keuangan yang maksimal, mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan melakukan pengurangan ketergantungan pada pendanaan pemerintahan pusat. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini bisa memberi dasar rekomendasi kebijakan yang tepat untuk pemerintahan daerah guna melakukan peningkatan kualitas fiskal, memunculkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan, dan memperkuat ekonomi lokal di Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2019–2025, sebagian besar kabupaten berada pada kategori “rendah sekali”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengalokasian belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Ketiga variabel tersebut berpotensi menjadi pendorong utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?
5. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat?

1.2.3 Tujuan Penelitian

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di Kalimantan Barat.